

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL

¹⁾Risma Depyana, ²⁾Muslan, ³⁾Abdul Sarlan Menungsa

(1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
 Email: rismaarsya17@gmail.com

Abstrak

Strategi komunikasi politik Kepala Desa Ulundoro dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah konflik di Desa Ulundoro Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dengan menggunakan sistem pendekatan kepada masyarakat, pemerintah desa dan BPD aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah desa dan pengawasan BPD agar informasi dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Ulundoro, Aere Kecamatan, Kabupaten Kolaka Timur.

Kata Kunci: Strategi; Komunikasi Politik; Konflik Sosial

Abstract

The political communication strategy of the Head of Ulundoro Village and the Village Consultative Body (BPD) in preventing conflict in Ulundoro Village, Aere District, East Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province is by using an approach system to the community, the village government and BPD are active in carrying out their respective duties and responsibilities, not prioritizing personal interests and using social media as a means of disseminating information about village government policies and BPD supervision so that information can be received by all levels of society in Ulundoro Village, Aere District, East Kolaka Regency.

Keywords: Strategy; Political Communication; Social Conflict

PENDAHULUAN

Kunci kesuksesan dalam menjalankan usaha salah satunya adalah komunikasi yang baik. Melalui komunikasi, informasi yang diberikan akan mampu menyentuh karyawan untuk menghindarkan dari kesalahan interpretasi, sehingga m Dalam kehidupan sosial, manusia tidak lepas dari aktifitas komunikasi yang tujuannya dapat membangun konsep diri, aktualisasi diri, bekerjasama dengan masyarakat demi meraih tujuan bersama. Komunikasi dapat dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu seperti dibidang politik. Komunikasi politik merupakan sebuah proses yang bisa menghubungkan dengan berbagai pihak yang dapat memberikan informasi positif, meneruskan aspirasi masyarakat serta menjadi input sistem politik Moha et al., (2021).

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung yaitu lewat media, menurut Effendy dalam Ketrin Vioala (2020) tujuan dari berkomunikasi adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak

lain. Sehingga strategi komunikasi merupakan suatu hal penting dalam proses komunikasi, dimana strategi komunikasi dilakukan untuk mensukseskan sebuah komunikasi agar pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan sesuai dengan tujuannya.

Komunikasi politik merupakan sebuah proses yang bisa menghubungkan dengan berbagai pihak yang dapat memberikan informasi positif, meneruskan aspirasi masyarakat serta menjadi input politik Moha et al., (2021). Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan aktor politik dan menyampaikan pesan politik atau terkait dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah Aminah (2018). Tujuan komunikasi politik adalah untuk membentuk opini dan citra publik, meningkatkan tingkat keterlibatan politik, menghasilkan kemenangan elektoral, dan berdampak pada kebijakan Arifin (2018). Sumber, pesan, saluran media, penerima dan efek merupakan komponen yang membentuk komunikasi politik.

Badan permusyawaratan desa juga bertanggung jawab memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini disampaikan jauh sebelum pemilihan kepala desa. Badan permusyawaratan desa beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan desa serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi ditingkat desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun tugas badan permusyawaratan desa yaitu menggali aspirasi, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Rauf dan Maulidiah (2016).

Konflik di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan yang terjadi yaitu dalam bentuk fisik/materi bukan berarti ada bentrokan fisik, melainkan lebih pada mempersoalkan materi dalam hal benda atau uang. Seperti yang telah terjadi ini lebih banyak disebabkan aliran bantuan yang masuk ke Desa Ulundoro. Mulai dari pengadaan penyaluran bantuan seperti PKH dan atau program sembako (BPNT) sampai bantuan penyaluran BLT.

Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dengan masyarakat tidak dapat menghindari konflik karena konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mencegah konflik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang pasal 2 ayat 1 dan 2 memuat tentang pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pencegahan konflik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 4 ruang lingkup penanganan konflik meliputi: a) pencegahan konflik, b) penghentian konflik, c) pemulihan pasca konflik.

Penelitian tentang komunikasi politik antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pencegahan konflik sosial di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur ini penting dilakukan karena menggambarkan fenomena yang terjadi di Masyarakat, menjelaskan hubungan antara fenomena dan masyarakat serta memperkirakan fenomena masyarakat yang mungkin terjadi dimasa depan. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam bidang ilmu pemerintahan karena membantu pemerintah daerah mengetahui

tentang fenomena yang terjadi dimasyarakatnya dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena fenomena yang diteliti dalam penelitian ini membutuhkan data lapangan faktual melalui observasi yang mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur. Waktu penelitian ini direncanakan dari Mei 2024 sampai selesai. Namun hal ini tidak berlaku mutlak dalam arti kata fleksibel sampai peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pemerintah desa seperti kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur. Informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu mampu menjawab rumusan masalah mengenai strategi komunikasi politik kepala desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah konflik sosial di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur yang berjumlah 11 orang. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu: dengan cara Observasi, wawancara dan serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mencegah Konflik Sosial

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media) penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Selanjutnya akan disajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dengan mengacu pada teori perencanaan komunikasi yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles Berger (2007), yang mengemukakan perencanaan komunikasi yang terdiri atas mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan seleksi penggunaan media.

a. Mengenal Khalayak

Khalayak merupakan sekelompok individu yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku komunikasi yang dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama dengan komunikator atau penyampai pesan. Mengenal khalayak adalah langkah bagi komunikator agar komunikasi yang dilakukan berjalan efektif dengan memperhatikan latar belakang khalayak.

Kriteria pencapaian suatu komunikasi yang efektif yaitu pihak penyampai pesan perlu mengenal khalayak atau pihak penerima pesan yang berperan sebagai target komunikasi. Pihak yang menjadi target tersebut bisa seseorang atau sekelompok orang. Komunikator perlu memperhatikan tipe dan juga latar belakang khalayak, pengetahuan dan pengalaman yang kompleks, keadaan lingkungan dalam pengadaan komunikasi tersebut

dilaksanakan. Sehingga komunikasi tidak hanya menjadi pihak yang akan menerima pesan saja melainkan juga khalayak yang mampu menerjemahkan dan memahami pesan yang disampaikan komunikator dalam komunikasi.

Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur dipimpin oleh bapak M. Amir. M dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ulundoro Kecamatan Aere saling berkoordinasi dalam menentukan arah kebijakan dalam pemerintahan di Desa Ulundoro, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa Ulundoro memerlukan adanya lembaga yang mengawasi kinerja dan pengambilan kebijakan pemerintah Desa Ulundoro agar tidak terjadi konflik antar masyarakat dan Pemerintah Desa Ulundoro yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan mampu melaksanakan tanggungjawab pengawasan terhadap pemerintah Desa Ulundoro dengan sebaik mungkin, selain itu koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Ulundoro diharapkan berjalan dengan harmonis.

Kepala Desa Ulundoro menginginkan adanya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dalam hal ini pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain itu Kepala Desa mengharapkan agar BPD mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Ulundoro sehingga Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulundoro mampu mengenal khalayak dengan baik dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat Desa Ulundoro.

Pemerintah Desa Ulundoro khususnya Kepala Desa Ulundoro harus mampu berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya serta mampu mengambil kebijakan yang tidak memihak kepada satu kelompok masyarakat tertentu. Jika pemerintah desa hanya mementingkan satu kelompok tertentu saja maka akan lebih mudah memicu timbulnya konflik sosial yang memecah belah persatuan masyarakat di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur.

Analisis terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengenal khalayak dibutuhkan pemimpin yang mampu berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan satu kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan ketimpangan sosial sehingga terjadi konflik di lingkungan desa tersebut. Jika nantinya terjadi konflik sosial maka persatuan dari masyarakat Desa Ulundoro akan tidak mudah untuk mempersatukannya kembali, hal ini dapat terjadi karena karakter setiap masyarakat yang berbeda, dimana terdapat masyarakat tidak mudah memahami maksud dan tujuan dari keterangan yang diberikan oleh pihak terkait yang akan mempersatukan kembali masyarakat yang terlibat konflik sosial.

Pemerintah desa dalam melaksanakan roda pemerintah cukup baik. Hal ini disebabkan karena Kepala Desa Ulundoro bersama jajarannya ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan desa tersebut, tidak hanya itu Kepala Desa Ulundoro bersama jajarannya merangkul masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada sehingga masyarakat merasakan bahwa keikutsertaan mereka sangat diharapkan adanya. Inilah yang membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan tanggapan yang cukup baik terhadap kinerja dari Kepala Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala Desa Ulundoro bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai mampu berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur dengan tujuan kemajuan dan pembangunan desa yang baik dan memaksimalkan pelayanan prima terhadap masyarakat di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur.

Analisis terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa mengenal khalayak khususnya di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, sesuai dengan hasil wawancara bahwa masyarakat sejahtera, aman, damai dan sentosa adalah tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur. Sehingga harapan dari semua kalangan yaitu tidak adanya konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang akan memecah belah masyarakat bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa memiliki hubungan kerja sama yang cukup baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat sehingga dampak dari keharmonisan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memberikan efek positif di lingkungan Desa Ulundoro dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi di Desa Ulundoro.

Musyawah Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah bentuk dari proses mengenal khalayak di Desa Ulundoro yang dilakukan oleh BPD. Musyawarah ini dilakukan agar setiap pendapat baik itu berupa keluhan, kritik dan saran dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena BPD memiliki tugas pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Ulundoro dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam mengenal khalayak melakukan musyawarah adalah cara yang dinilai cukup efektif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Menyusun Pesan

Dalam Menyusun pesan kemampuan membangkitkan dan menarik perhatian khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan merupakan hal yang paling penting dilakukan agar pesan dapat tersalurkan dengan baik sehingga menimbulkan efek dan timbal balik yang positif dari pesan yang disampaikan. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa Ulundoro dalam hal ini pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulundoro dan Masyarakat Desa Ulundoro.

Penyusunan pesan harus dilakukan dengan cermat agar pesan yang kita berikan mempunyai daya tersendiri bagi komunikan. Antusiasme adalah pengamatan yang terpusat. Kredibilitas suatu komunikasi bermula dari peningkatan antusiasme audien terhadap nilai dari pesan yang dikomunikasikan. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari informasi isi pesan ialah mampu menarik perhatian khalayak.

Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun pesan yang akan disampaikan dengan melakukan tatap muka langsung dan melakukan musyawarah dan memberikan sanksi jika kesalahan yang dilakukan sudah fatal.

Langkah atau strategi Kepala Desa dalam menghadapi setiap masalah di pemerintahan desa, sikap yang harus diambil yaitu merangkul masyarakat yang terlibat konflik, dan menyelesaikan konflik yang terjadi secara bersama-sama namun dengan syarat masyarakat yang terlibat konflik diharapkan mampu menerima saran dan arahan yang sifatnya membangun dalam penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Analisis terhadap hal tersebut yaitu Kepala Desa Ulundoro memiliki langkah-langkah dalam menyusun pesan atau strategi yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang muncul dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terlibat konflik dan memberikan saran yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut. Masyarakat yang terlibat konflik sosial diharapkan mampu menerima setiap keputusan yang ditetapkan dengan lapang dada demi kebaikan bersama antara sesama sumber penyebab terjadinya konflik yang timbul. Dengan adanya jalan damai secara kekeluargaan

ini, maka kepala desa selaku pemerintah desa dianggap mampu menyelesaikan konflik tanpa merugikan pihak manapun.

Sikap toleransi dan saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing individu tentang langkah atau strategi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi setiap masalah di pemerintahan adalah sebuah langkah atau strategi yang cukup baik diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di lingkungan masyarakat Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur.

Analisis terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa menyusun pesan langkah atau strategi yang harus dilakukan adalah menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Sehingga dalam menyusun pesan menghargai dan menghormati pendapat orang lain adalah langkah untuk mengenalkarakter dari masyarakat di Desa Ulundoro sehingga dalam penyelesaian konflik akan mudah dalam mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak dalam hal ini masyarakat Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak mengalami miss communication dalam menyikapi konflik yang terjadi.

Musyawarah dan menghargai setiap pendapat yang ada menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi konflik yang ada. Melihat dari masalah yang ada yaitu berupa penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat membuat konflik di lingkungan masyarakat Desa Ulundoro yang mana konflik tersebut berupa penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria dan yang memenuhi kriteria tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Desa Ulundoro sebagai pengambil Keputusan yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial antar sesama masyarakat Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun analisis terhadap hal tersebut yaitu dalam menyusun pesan melakukan musyawarah dan tidak memihak pada suatu individu tertentu adalah langkah yang tepat dan dinilai sangat efektif agar informasi yang disampaikan dan keputusan yang diambil dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh kalangan masyarakat Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur. Dalam menyusun pesan perlu adanya hal yang dapat menarik perhatian sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan

Agar terhindar konflik Badan Permusyawaratan Desa berpendapat bahwa menumbuhkan rasa perduli terhadap masyarakat, menggunakan sikap dan kalimat yang sopan, pendekatan kepada masyarakat dan selalu ikut turut serta dalam perkumpulan di lingkungan masyarakat Desa Ulundoro dapat menjadi solusi agar konflik dapat dihindari. Analisis terhadap hal tersebut yaitu penyusunan pesan yang matang sangat diperlukan, hal ini dikarenakan dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter itu tidak mudah, maka pengambilan keputusan harus benar-benar dipertimbangkan agar tidak menimbulkan konflik kedepannya, dengan cara yang dinilai cukup efektif yaitu dengan merangkul seluruh kalangan di lingkungan masyarakat Desa Ulundoro.

Dalam menyusun pesan penggunaan kata dan kalimat yang mudah dipahami oleh penerima informasi menjadi hal utama sehingga informasi yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat Desa Ulundoro sehingga masyarakat tersebut dapat mudah mengerti dengan maksud tujuan informasi yang diberikan. dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa, dan BPD harus mampu menyampaikan informasi dengan baik dan dengan cara penyampainnya yang mudah dipahami sehingga masyarakat selaku penerima informasi dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi informasi yang diterima.

Dalam Musyawarah Pemerintah Desa Ulundoro yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah desa seperti gambar diatas adalah langkah dalam menyusun pesan dengan cara melakukan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh elemen perwakilan di Desa Ulundoro. Tujuan adanya musyawarah tersebut agar pesan dan maksud dari pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Desa Ulundoro. Sehingga keputusan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa Ulundoro dapat diterima dan diketahui oleh masyarakat Desa Ulundoro.

c. Menetapkan Metode

Dalam menetapkan metode perlu diperhatikan aspek dari nilai informatif dan edukatif dari pesan yang disampaikan kepada khalayak sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penyampaian informasi. Didalam proses komunikasi, metode penyampaian dapat dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama ialah menurut cara pelaksanaannya, sedangkan aspek yang kedua menurut dari bentuk dan isi, yaitu melihat komunikasi dari segi pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung

Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa dalam menyelesaikan konflik yang ada yaitu dengan melakukan metode tatap muka secara langsung dan bermusyawarah dengan mereka yang terlibat konflik yang tentunya dihadiri oleh pihak-pihak perwakilan dari masing-masing yang terlibat konflik, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak keamanan yaitu BABINSA DAN BHABINKANTIBMAS yang akan membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat di Desa Ulundoro.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu belajar dari kesalahan sebelumnya agar tidak mementingkan kepentingan pribadi, melakukan sosialisasi tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, selain itu pendekatan kepada masyarakat juga dilakukan Kepala Desa, pemerintah desa dan BPD.

Tidak mementingkan kepentingan pribadi dan tidak memihak pada satu kelompok tertentu merupakan hal yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dibutuhkan agar konflik tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan cepat dan sigap adalah hal yang efektif dalam penyelesaian masalah ataupun konflik yang terjadi antara sesama masyarakat yang berada di lingkungan Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. pemerintah desa tidak melakukan Tindakan apapun yang dilakukan pemerintah desa maupun BPD sehingga tetap terjadi kecemburuan sosial dalam antara masyarakat Desa Ulundoro dalam menentukan siapa saja yang layak untuk menerima bantuan sosial. Analisis dari hal tersebut bahwa pemerintah desa diharapkan mampu mendengar aspirasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat sehingga dapat mengatasi konflik yang terjadi .sehingga kedepannya penerima bantuan social dapat tepat sasaran.

Dalam menetapkan metode pemerintah desa dan BPD harus mampu mempengaruhi masyarakat dalam hal penyampaian informasi positif agar dapat menerima informasi yang disampaikan dengan baik dan benar sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah penetapan metode berdasarkan cara pelaksanaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ulundoro bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana pemerintah desa bersama BPD melakukan kegiatan penyaluran bantuan sosial secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan Pemerintah Desa Ulundoro.

d. Seleksi Penggunaan Media

Penggunaan media yang tepat dalam penyampaian pesan dapat berpengaruh terhadap respon masyarakat, hal ini bertujuan agar informasi lebih mudah didapat oleh komunikan. Pemerintah desa dan BPD telah peneliti lakukan wawancara bersama terkait hal tersebut. Seleksi penggunaan media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi khalayak, sehingga dalam proses penyampaian pesan tidak ada kesalahpahaman (noise).

Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa dalam menyalurkan informasi pemerintah desa menggunakan sosial media sosial berupa facebook agar informasi dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat Desa Ulundoro. Tujuan dari adanya agar pemerintah Desa Ulundoro dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat Desa Ulundoro dalam penyebaran informasi yang tepat sasaran dan berlangsung dengan cepat. Selain itu masyarakat juga tidak perlu datang langsung kepada pemerintah jika terdapat hal yang ingin dipertanyakan, melainkan mengirim pesan melalui media sosial facebook yang telah disediakan oleh pemerintah Desa Ulundoro. jika terdapat konflik di masyarakat, apakah ada penyelesaian konflik antara pihak yang dilakukan secara tatap muka seperti melakukan pertemuan yang didalamnya ada BPD dan masyarakat serta kepala desa itu sendiri atau hanya menggunakan media komunikasi seperti via telepon.

Penggunaan media telepon dan grup whatsapp menjadi media yang paling efektif digunakan dalam menyampaikan informasi. selain menggunakan media facebook, pemerintah desa juga menggunakan media telepon dan grup whatsapp dalam menyebarkan informasi. Dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media komunikasi sangat diperlukan agar penyampaian informasi dapat tersalurkan secara menyeluruh di kalangan masyarakat Desa Ulundoro.

Penggunaan media *WhatsApp* dan *Facebook* adalah media yang digunakan Pemerintah Desa Ulundoro dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh dan cepat. Penggunaan kedua media tersebut dinilai efektif karena mayoritas masyarakat Desa Ulundoro memiliki media sosial facebook dan whatsapp, maka dalam seleksi penggunaan media yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ulundoro dianggap sudah tepat karena berdasarkan penggunaan media sosial yang mayoritas digunakan oleh masyarakat di Desa Ulundoro.

SIMPULAN

Strategi komunikasi politik Kepala Desa Ulundoro dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah konflik di Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dengan menggunakan sistem pendekatan kepada masyarakat, pemerintah desa dan BPD aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing, tidak mementingkan kepentingan pribadi serta menggunakan media sosail sebagai sarana penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah desa dan penwasanan BPD agar informasi dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Desa Ulundoro, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. Banjarmasin.
- Arifin, A. (2011). Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Graha Ilmu.
- Andrew E. Sikula, (2017). Komunikasi Bisnis. Surakarta: Erlangga.
- Budianto., H. (2018). Media Dan Komunikasi Politik. Mbridge Press.

- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, (2011), *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , O. U. (2018). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, (2019), *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hardjana, Agus. M. (2016). *Ilmu Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Malayu, (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Mulyana, (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , (2015). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, (2016). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. PT Grafindo Persada.
- Rauf, dan Maulidiah. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. Zanaf Publishing. Yogyakarta.
- , (2015). *Pemerintahan Desa*, Zanaf Publishing. Yogyakarta.
- Rismawaty, Eka dan Juliono, (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Solihat Maulin dan Sholihin, (2015). *Interpersonal Skill Tips Membangun Komunikasi Dan Relasi*. Bandung: Rekayasa Sain.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , (2018). *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif dan R&B*. Alfabeta.
- , (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, E., Darmawan, D., & Mulyadi, A. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. CV Pustaka Setia.
- Widoyoko, (2015). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Skripsi:

- Arumsari, N., Septina, E., Luthfi, M., & Rizki, N. (2017). *Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.
- Irwandi. (2017). *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)*.
- Maryani, 2021. *Komunikasi Politik Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mencegah konflik sosial (Studi Kasus Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tenggamas)*(Skripsi). Universitas Lampung.
- Maternity, F., (2018). *Peranan Pemerintah Dalam Konflik Antara Masyarakat Dengan Pt.Pp Lonsun Di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*. *International Reviews of Immunology*.
- Muhammad Saidil, 2019. *Komunikasi Politik Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jurnal:

- Aminah, A. (2018). *Strategi Komunikasi Politik (Kampanye) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Drs. H. T. Irfan Tb Dan Tgk. Yusri Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Jaya*. Source : *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Anggi farera, Muammad alfikri, 2022. *Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa di Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 6.

- Dr. Lina Sunyanta DKK. (2018). Strategi Komunikasi Pada Program WWF Indonesia Program Kalimat Barat. Jurnal. Pontianak: Komunika.
- Dyawati, Y., Lidya, E., Ini, Y., & Pahrozi, R. (2018). Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin Ii Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Jurnal Sosiologi Reflektif.
- Hasanah, U. (2020). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Lembaga Pendidikan Islam. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam.
- Indri yana. (2016). Arus Komunikasi Kepala Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 3.
- Mellia, G. Hertano. Warganegara, A. Kurniawan, R,C. 2021. Managing Organizational Conflict in the 2019 Cuncurrent Elevtion In Palembang. Jurnal Studi Sosial dan Politik. Vol 5. No 1.
- Mustamin. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Mandala Education.
- Rahmah, M.N (2016). Model Komunikasi Interpersonal dalam Kisah Nabi Yusuf As. Oleh: Mariyatul Norhidayati Rahmah Abstrak. Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah Vol.04 No. 07.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 17. No 33.
- Rochmat, U., Mulyana, N., & Irfan, M. (2015). Pekerja Sosial Dan Penyelesaian Konflik Di Indonesia. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Salim, N., Haruna, J., Charles. (2017). Analisis Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap Efektivitas Pengelolaan SD di Kab. Kutai Kartanegara. Jurnal Pendas Mahakam: 254.
- Tawakkal, G., Suhardono, W., Garner, A. & Seitz, T. (2017). Consistency and vote buying: Income, education, and attitudes about vote buying in Indonesia. Journal of East Asian Studies.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. Jurnal Publiciana.